



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSTICIA DEWI MAHARANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN
3. NHK : 400819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.085.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
3. Tanah Seluas 810 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 215.000.000
4. Tanah Seluas 4205 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.110.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1100 m2/130 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 315.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 262.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, SUZUKI XL 7415F GX (4X2) A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 256.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 43.940.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.493.267

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.430.433.267

III. HUTANG Rp. 734.037.478

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.696.395.789



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.